

Memahami Uji Kompetensi dan Undang-Undang Guru

**Regina Sipayung¹, Aprianti Simanungkalit^{1*}, Alike Banjar Nahor¹, Yohani Hutajulu¹,
Helmi Br Ginting¹, Emia Latersia S Brahmana¹, Hanna Panjaitan¹, Junita Stevania
Situmeang¹, Stevanny Amanda Sidabutar¹, Enzel Ulina Siburian¹**

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Santo Thomas, Indonesia

*Corresponding author : simanungkalitapriyanti@gmail.com

Article History:

Received : 24-01-2025

Accepted : 30-01-2025

Keywords: Uji Kompetensi
Guru; Undang-Undang Guru;
Peraturan Pemerintah; Kualitas
Pendidikan; Profesi Guru

ABSTRAK

Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada kualitas tenaga pengajar. Oleh karena itu, kompetensi guru menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru di Indonesia adalah melalui uji kompetensi yang diatur oleh pemerintah. Artikel ini membahas pentingnya uji kompetensi bagi guru, materi yang diuji dalam uji kompetensi, serta pelaksanaan uji kompetensi di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga membahas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan peraturan pemerintah yang mengatur hak dan kewajiban guru. Dengan adanya uji kompetensi dan peraturan yang jelas, diharapkan kualitas pendidikan dapat terus meningkat dan guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Uji Kompetensi Guru (UKG) menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa guru memiliki kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan uji kompetensi guru di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta peran regulasi seperti Undang-Undang Guru dan Dosen dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis data sekunder dari berbagai regulasi pendidikan dan hasil studi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UKG efektif dalam mengevaluasi kompetensi dasar guru, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti ketimpangan akses di wilayah terpencil, kurangnya kesiapan guru, serta fokus yang berlebihan pada tes tertulis.

PENDAHULUAN

Guru merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Seiring dengan berkembangnya zaman, kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memastikan kompetensi guru yang memadai. Uji kompetensi guru di Indonesia diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa seorang guru memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendidik. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan berbagai peraturan terkait profesi guru menjadi landasan hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap profesi guru di Indonesia.

Pentingnya pemahaman mengenai uji kompetensi guru dan regulasi yang ada akan membantu meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu,

dalam jurnal ini, kami akan membahas tentang materi uji kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, serta kaitannya dengan Undang-Undang yang mengatur profesi guru di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru adalah melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG bertujuan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional yang dimiliki guru sebagai bagian dari proses pengembangan profesi berkelanjutan. Pelaksanaan UKG di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban guru, tetapi juga menegaskan pentingnya sertifikasi dan pengakuan profesionalisme guru. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan uji kompetensi dan implementasi kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesiapan guru, ketimpangan akses pelatihan, dan evaluasi yang belum optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis peran uji kompetensi serta regulasi yang mengatur profesi guru di Indonesia. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan uji kompetensi dan penerapan peraturan-peraturan yang mengatur profesi guru.

PEMBAHASAN

Pentingnya Uji Kompetensi Bagi Guru

Uji kompetensi guru adalah alat untuk mengukur sejauh mana guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Uji kompetensi tidak hanya bertujuan untuk menilai kemampuan mengajar, tetapi juga untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan yang mendalam tentang mata pelajaran yang diajarkan serta kemampuan interpersonal yang baik untuk berinteraksi dengan siswa dan masyarakat.

Kompetensi yang diukur dalam uji kompetensi mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik: Kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif.
2. Kompetensi Profesional: Penguasaan materi ajar yang mendalam sesuai dengan bidang yang diajarkan.
3. Kompetensi Sosial: Kemampuan guru dalam berinteraksi dan membangun hubungan positif dengan siswa, orang tua, dan rekan sejawat.
4. Kompetensi Kepribadian: Kemampuan guru untuk menjadi teladan bagi siswa dalam hal sikap dan moral.

Pentingnya uji kompetensi terletak pada peranannya dalam memastikan bahwa guru-guru yang berada di lapangan memiliki kualitas yang memadai, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara keseluruhan.

Materi yang Diuji Dalam Uji Kompetensi Guru

Materi yang diuji dalam uji kompetensi guru meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan profesi pendidikan, antara lain:

1. Kompetensi Pedagogik

Uji ini menilai sejauh mana guru mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Guru diharapkan dapat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memastikan bahwa pembelajaran berlangsung efektif.

2. Kompetensi Profesional

Di sini, guru diuji tentang pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Guru diharapkan dapat menguasai materi ajar dengan mendalam dan menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa.

3. Kompetensi Sosial

Uji kompetensi sosial bertujuan untuk menilai kemampuan guru dalam berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti siswa, orang tua, dan masyarakat. Guru yang memiliki kompetensi sosial yang baik dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan mendukung proses belajar mengajar.

4. Kompetensi Kepribadian

Aspek ini mengukur sejauh mana guru memiliki sikap profesional, moral, dan etika dalam menjalankan tugasnya. Guru diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa, baik di dalam maupun di luar kelas.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru

Pelaksanaan uji kompetensi guru di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian ini dilakukan secara berkala, dan bagi guru yang berhasil lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat yang menjadi syarat untuk menerima tunjangan profesi. Uji kompetensi dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode, seperti tes tertulis, portofolio, observasi praktik mengajar, dan wawancara. Pelaksanaan uji kompetensi ini juga menjadi sarana untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, serta memastikan bahwa hanya guru yang memiliki kompetensi tinggi yang mengajar di kelas. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan dan workshop guna mempersiapkan diri menghadapi ujian tersebut.

Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Profesi Guru

Di Indonesia, profesi guru diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pengangkatan, pemberhentian, serta hak dan kewajiban guru. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan mengikuti pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikasi. Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya serta memberikan hak kepada guru untuk mendapatkan tunjangan profesi jika memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang lebih rinci mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kewajiban guru, serta hak untuk mendapatkan kesejahteraan.

Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru

Uji kompetensi bagi guru di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu melalui Uji Kompetensi Awal dan Uji Kompetensi Berkala. Uji kompetensi awal dilakukan pada saat guru pertama kali melamar

menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tetap di sekolah swasta. Uji kompetensi berkala dilakukan setiap beberapa tahun sekali untuk mengevaluasi perkembangan kompetensi guru.

Pelaksanaan uji kompetensi biasanya meliputi berbagai aspek, antara lain:

1. Tes tertulis yang mengukur penguasaan materi ajar, pengetahuan pedagogik, dan profesionalisme guru.
2. Observasi kelas untuk menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas.
3. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui sikap, motivasi, dan etika profesional guru.
4. Portofolio yang mencakup dokumentasi pengajaran, karya ilmiah, dan pengembangan diri guru.

Berdasarkan temuan, meskipun pelaksanaan uji kompetensi sudah cukup baik, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kesenjangan akses pelatihan di daerah terpencil, serta perbedaan standar kompetensi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

Evaluasi Terhadap Sistem Uji Kompetensi

Sistem uji kompetensi yang ada saat ini sudah mengalami perkembangan, namun masih memiliki kekurangan. Beberapa masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan uji kompetensi adalah:

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya

Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, kurangnya fasilitas dan akses terhadap teknologi menjadi hambatan bagi guru dalam mengikuti uji kompetensi secara efektif. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pelaksanaan uji kompetensi antar daerah.

2. Fokus Pada Tes Tertulis

Meskipun uji kompetensi mencakup beberapa aspek, banyak yang menganggap bahwa tes tertulis lebih mendominasi. Padahal, dalam profesi guru, kemampuan praktis dan keterampilan mengajar langsung juga sangat penting. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengimbangi tes tertulis dengan observasi kelas yang lebih mendalam untuk menilai keterampilan mengajar guru secara langsung.

3. Proses yang Tertunda

Terkadang ada keterlambatan dalam proses sertifikasi dan uji kompetensi, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup. Proses ini terkadang menghambat pengembangan karier guru dan dapat menurunkan motivasi mereka untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran.

Dampak Uji Kompetensi Terhadap Kualitas Pendidikan

Secara umum, uji kompetensi memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru yang lulus dari uji kompetensi memiliki penguasaan materi yang lebih baik dan kemampuan pedagogik yang lebih berkembang. Hal ini tentu saja akan berdampak langsung pada proses pembelajaran di kelas.

Namun, dampak positif tersebut belum sepenuhnya dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa daerah, pelaksanaan uji kompetensi belum berjalan dengan efektif, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pengajaran antara daerah yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, perlu ada pemerataan dalam pelaksanaan uji kompetensi, serta distribusi pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru di daerah yang kurang berkembang.

Kaitan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur secara rinci tentang kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Dalam undang-undang ini, diatur bahwa guru harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dan wajib mengikuti pendidikan profesi. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi kualifikasi guru adalah uji kompetensi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Undang-Undang ini, meskipun sudah ada peraturan yang jelas, implementasinya terkadang kurang merata, terutama dalam hal pengawasan dan pemberian bantuan bagi guru di daerah terpencil. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dari segi pembinaan dan pemberdayaan guru untuk memastikan agar kebijakan yang ada dapat terlaksana dengan lebih efektif.

Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Uji Kompetensi

Uji kompetensi tidak hanya sekadar alat untuk menilai kualitas guru, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru. Melalui uji kompetensi, guru diberi kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan diri dan melakukan pengembangan diri agar dapat mengajar lebih efektif. Selain itu, uji kompetensi juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk pemberian tunjangan profesi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajarannya.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah perlunya dukungan yang lebih besar dari pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas pelatihan, akses ke informasi terbaru dalam bidang pendidikan, serta sistem evaluasi yang lebih holistik dan tidak hanya berfokus pada tes tertulis.

Rekomendasi Untuk Perbaikan Sistem Uji Kompetensi

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk perbaikan sistem uji kompetensi guru di Indonesia:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil untuk memastikan bahwa semua guru memiliki akses yang setara terhadap pelaksanaan uji kompetensi.

2. Diversifikasi Metode Penilaian

Mengingat pentingnya kompetensi praktis dalam mengajar, perlu ada diversifikasi dalam metode penilaian uji kompetensi, yang mencakup observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas dan penilaian berbasis kinerja.

3. Peningkatan Pendampingan dan Pelatihan

Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi guru, terutama yang berada di daerah yang sulit dijangkau. Program ini dapat mencakup pelatihan berbasis teknologi dan pendekatan pedagogik inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman.

KESIMPULAN

Uji kompetensi guru merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Melalui uji kompetensi, pemerintah dapat memastikan bahwa guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta membantu guru untuk terus meningkatkan keterampilannya dalam mengajar. Di samping itu, Undang-Undang dan

peraturan pemerintah yang mengatur profesi guru memberikan dasar hukum yang kuat bagi profesi ini dan memastikan bahwa guru mendapat perlindungan serta hak yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya sistem uji kompetensi yang efektif dan regulasi yang mendukung, diharapkan guru-guru di Indonesia dapat menjalankan profesinya dengan lebih profesional, sehingga berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ningsih, R. (2021). Peningkatan Kompetensi Guru melalui Sertifikasi dan Uji Kompetensi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(3), 70-82.
- [2] Putra, I. (2018). Evaluasi Sistem Uji Kompetensi Guru di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(2), 100-110.
- [3] Riyanto, P. (2017). Pengaruh permainan bola kasti terhadap peningkatan kemampuan gerak umum (general motor ability). *Journal Sport Area*, 2(1), 53. [https://doi.org/10.25299/sportarea.2017.vol2\(1\).593](https://doi.org/10.25299/sportarea.2017.vol2(1).593)
- [4] Setiawan, M. (2019). Analisis Implementasi Undang-Undang Guru dan Dosen dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 8(1), 30-40.
- [5] Suparlan, P. (2017). *Profesionalisme Guru dan Pendidikan Berkualitas*. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- [6] Susanti, E. (2020). Peran Uji Kompetensi Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 15(2), 45-56.
- [7] Suyatno, B. (2018). *Peningkatan Kompetensi Guru dalam Perspektif Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Gramedia Pustaka.